

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, terkadang juga dalam pembangunan ekonomi masih terjadi permasalahan yang mengakibatkan ketidakmampuan di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Akan dalam pembangunan ekonomi tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Negara seperti Negara berkembang ini adalah masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan sebagainya. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dimana dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan (tingkat

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015),hal. 438

pendidikan, adat-istiadat), posisi dimana manusia dalam lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Kemiskinan dalam pandangan islam bukanlah sebuah azab atau kutukan dari Tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezki) yang diberikan. Kemiskinan dalam islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sector ekonomi namun juga pada factor nonekonomi.

Islam memiliki system ekonomi secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya yang memilii akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran yang strategi (*maqasid al-syariah*). Sasaran yang dikendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka didasarkan pada konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyiban). Keadaan sosial ekonomi dan kebutuhan spritual. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataanya apabila terjadi kemiskinan tingkat kesejahteraan masyarakat itu dapat berkurang angkanya. Penyebab terjadinya kemiskinan juga dapat ditunjang kurangnya pendapatan

---

<sup>2</sup> Ridho Diana, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017), hal. 4

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

penghasilan yang diperoleh setiap harinya pada saat bekerja. Jika angka kemiskinan itu menurun berarti akan mengalami kenaikan kesejahteraan. Dalam artian jika kondisi masyarakat benar-benar kekurangan kesejahteraan, maka dia dalam kondisi miskin. Disisi lain sebaliknya jika dia berada dalam kondisi yang sangat sejahtera, maka hidupnya di tandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan.<sup>4</sup> Kemudian masyarakat dikatakan miskin menurut Todaro adalah bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Sedangkan menurut Emil Salim mereka yang berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.<sup>5</sup> Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, banyak ahli yang juga percaya bahwa kemiskinan bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang

---

<sup>4</sup> Michel Backer, Buku Panduan *Daerah Menuju Kesejahteraan Dalam Masyarakat Hutan*, (Bogor : Center For International Forestry Researon, 2007),hal.10

<sup>5</sup> Hadi Prayitno,Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996 ), hal.102.

melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya.

Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Kebutuhan hidup minimum ini antara lain, diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Jadi jika tingkat pendapatan itu dapat diartikan atau yang menentukan keadaan social masyarakat.

Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan/ profit. Dan pendapatan yang diperoleh pada saat perekonomian mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.<sup>6</sup>

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini juga menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015),hal. 438

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial”.<sup>7</sup> Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kemiskinan merupakan masalah struktural dan kultural yang multidimensi, mencakup di dalamnya masalah politik, sosial, ekonomi, aset dan sumber daya alam, psikologi dan lain-lainnya. Selain itu mempunyai kondisi yang mana berada dalam situasi rentan, tak berdaya dan tidak mampu untuk menyampaikan aspiransinya. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.<sup>8</sup>

Dilihat dari keislaman kemiskinan juga bermakna bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidaktidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>8</sup> Keppi Sukesi, “*Gender dan Kemiskinan Di Indonesia*”, (Malang : UB Press, 2015, Ctkn 1), hal. 1

penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rizqi yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang di namainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah “yang bergerak”.

Mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007.<sup>9</sup> Berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan dan memberikan peluang kerja. Dimana tujuan pendek program tersebut adalah mengurangi beban Keluarga Sangat Miskin (KSM), sedangkan jangka panjangnya adalah dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>10</sup>

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan serta dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat

---

<sup>9</sup> Evi Fitriah “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan*”, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2010) ,hal. 16

<sup>10</sup> Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2016 sumber: [www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul: 10:29WIB

yang mana dibawah kendali dan tanggungjawab Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kategorisasi masyarakat miskin sendiri menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia beserta Badan Pusat Statistik, kemudian mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan. Yaitu Keluarga Pra-Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (K-III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus).

Kelompok Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) inilah yang kemudian dikategorisasi oleh Bappenas sebagai penduduk miskin. Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) merupakan kelompok keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal, semisal kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta keagamaan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi semisal kebutuhan sekunder.<sup>11</sup>

Adapun tujuan dikeluarkannya Program Keluarga Harapan ini berfokus pada memutus rantai kemiskinan bagi generasi berikutnya serta memperbaiki taraf hidup masyarakat yang secara esensial menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan

---

<sup>11</sup> Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", (Jurnal Geografi : Volume 09, No 01, 2017), hal. 57-58

sebuah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi. Mengutip apa yang dikatakan oleh Midgley, bahwasannya kesejahteraan sosial merupakan “*a condition or state of human wellbeing*”.

Didalam islam juga menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Poin keimanan atau agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, poin akal untuk mengukur pendidikan, poin keturunan untuk menilai karakteristik kehidupan sosial warga, dan poin harta untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat. Kelima poin tersebut dikenal dengan istilah *Mqashid al-Syariah*.<sup>12</sup>

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itulah di dalam Alqur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhilifaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana Firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ  
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>12</sup> Kartawati, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017), hal. 11

Artinya : ” *Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* ” (Q.S Al-An’am :165).

Selain itu pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya belaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58, yang mana

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kami) apabila menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat* ” ( Q.S An-Nisa’ : 58 ).

Sejak dikeluarkannya Program ini pada Tahun 2007 hingga saat ini, banyak masyarakat miskin yang kemudian menjadi penerima manfaat ini. Anggaran Pemerintah melalui APBN yang dikucurkan pada Tahun 2018 untuk Program Keluarga Harapan, nominalnya cukup besar yaitu sekitar 17,8 Triliyun Rupiah guna memberikan manfaat bagi sekitar 10 Juta masyarakat pemegang Kartu PKH yang datanya berasal dari Balai Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (BDT PPLS 2011) milik Kementerian Sosial Republik. Nilai nominal bantuan tersebut yang diterima KPM adalah Rp. 1.890.000/tahun. Kemudian Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita menjelaskan kenaikan bansos pada tahun

2019 terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp550 ribu ditambah komponen yang ada di dalam setiap keluarga.

Untuk keluarga yang memiliki anak bersekolah SD maka ada tambahan bantuan Rp900 ribu, untuk SMP tambahannya Rp1,5 juta, dan SMA sebesar Rp2 juta. Kemudian, apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ibu yang memiliki balita, maka indeks bantuan akan ditambah sebesar Rp2,4 juta. Sementara apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat lansia dan atau penyandang disabilitas maka mendapat tambahan Rp2,4 juta rupiah. Selain itu uang nya juga bisa dipergunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan setelah kebutuhan pokok terpenuhi.

Program Keluarga Harapan di Mojokerto sudah diterapkan dan membuktikan di 3 tahun akhir ini (2016-2018) angka kemiskinan di Mojokerto mengalami fluktuasi, berdasarkan data laporan desa tahun 2016 9,6% tahun 2017 9,9%, tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 4,5%.

**Tabel 1.1**  
**Angka Kemiskinan Desa Mojoranu**

Tahun (Year)	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (number of poor people)	
	(Poverty Line)Rupiah	Jumlah Total (Ribu)	Persentase (percentage)
2016	20.740	10,50	9,6
2017	32.230	10,85	8,9
2018	40.687	11,45	9,5

*Sumber : Laporan Desa*

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Todaro bahwasanya semakin bertambah kesempatan pendidikan semakin cepat pula proses

pembangunannya. Lincoln menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Dari aspek pendidikan dan kesehatan dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat.<sup>13</sup>

Berkaitan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ataupun sampel penelitian adalah masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mojokerto Desa Mojaranu. Yang mana sudah mulai menerima manfaat program tersebut, maka sebagaimana data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, diperoleh data bahwa jumlah keseluruhan masyarakat yang masuk kategori miskin di Kabupaten Mojokerto berjumlah lumayan banyak.

Khusus Kabupaten Mojokerto, Program Keluarga Harapan sudah dimulai sejak tahun 2007 hingga sekarang. Ada 10 kecamatan yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mojokerto. Program ini telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari hambatan / hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Di Mojokerto merupakan salah satu daerah yang menerima program keluarga harapan. Kemudian pada 2017 sudah ada tambahan jumlah penerima bantuan tersebut yaitu 24.888 keluarga penerima manfaat. Namun saat ini juga sudah mengalami bertambah jumlah lebih dari 50 persen. Dari 24.888 keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertambah menjadi 14.756

---

<sup>13</sup> Aprilia Saraswati, “*Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 28

KPM. Menurut Lutfi Ariyono, Kepala Dinas Sosial mengatakan, dengan bertambahnya penerima PKH ini, total penerima PKH di Kabupaten Mojokerto tahun ini sebanyak 39.644 KPM.<sup>14</sup>

Khususnya Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto juga sudah tersentuh oleh PKH, dimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini sudah dimulai sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 sampai sekarang yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) sekitaran berjumlah 50 RTM.

**Table 1.2**  
**Angka Nominal Penerima PKH**

Nomer RTM	Manfaat Program Keluarga Harapan		
	2016	2017	2018
RTM 1	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
RTM 2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.950.000
RTM 3	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.750.000
RTM 4	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.650.000
RTM 5	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
RTM 6	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.900.000
RTM 7	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
RTM 8	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.650.000
RTM 9	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.250.000
RTM 10	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.950.00

*Sumber : Kelurahan Desa Mojaranu*

<sup>14</sup> <https://suaramojokerto.com/2018/02/21/penerima-pkh-di-mojokerto-bertambah-14-756-keluarga/> diakses 24 Januari 2019, pukul 21.07

Dalam table diatas menunjukkan bahwa setiap RTM yang sudah terdaftar atau yang termasuk anggota PKH mendapatkan manfaat dari program tersebut. Setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tahun 2016 rata-rata semua RTM mendapatka Rp. 500.000, tahun 2017 rata-rata juga mendapatkan Rp. 1.000.000.

Namun berbeda ditahun 2018 yang mana peraturan pembagiannya berdasarkan aturan tahun yang lama yang mana menggunakan setiap anak yang didata. Pengambilan dana tersebut menggunakan kartu yang sudah disediakan dan diambil di bank serta pengambilannya itu 3 bulan sekali, jadi disetiap tahun dapat melakukan penarikan 4 kali dalam setahun.

Dimana jumlah tersebut dikelompokkan oleh pemimpin anggota penerima PKH yang dibentuk oleh kelurahan. Kemudian dalam mengelompokkan orang-orang yang dikategorikan miskin yang akan dirapatkan oleh para penting yang di kelurahan serta menyeleksi dan di survey, apakah termasuk kategori RTM.

Sebenarnya selain itu Desa Mojoranu juga tersentuh oleh program-program pemerintah lainnya yang bersifat membantu ataupun meringankan kebutuhan masyarakat di Desa Mojoranu. Program-program bantuan pemerintah yang di dapat masyarakat Desa Mojoranu selain PKH yaitu seperti; Beras Miskin (raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bensos, Bantuan pangan non tunai (BPNT) dan lain sebagainya.

Karena bagaimanapun juga, Program Keluarga Harapan ini sudah diluncurkan sejak Tahun 2007, dan di era Pemerintahan Joko Widodo hingga saat ini yaitu akhir tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018. Program ini terus dilanjutkan karena era Pemerintahan saat ini menganggap program ini secara umum kemudian berjalan dengan sangat baik dan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan dapat memperbaiki kesejahteraannya.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Program Keluarga Harapan terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Mojoranu Kabupaten Mojokerto)”**.

---

<sup>15</sup> Winda Jayanti, *“Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 9-10

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Mojoranu Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah tinjauan teori Maqashid al-Syariah terhadap pengaruh Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Mojoranu Kabupaten Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peran PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Mojoranu Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan teori Maqashid al-Syariah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Mojoranu Kabupaten Mojokerto

## **E. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Penelitian ini mencangkup tentang pengaruh Program Keluarga Harapan dimana lebih mendalam dalam program keluarga harapan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mojokerto khususnya bagi wilayah desa mojoranu yang notabennya banyak mengalami kekurangan.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat maka penulis memberi batasan permasalahan penelitian pada: analisis peran Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di sekitar kabupaten Mojokerto. Lokasi dalam penelitian ini bertempat Kabupaten Mojokerto Kecamatan Sooko Desa Mojaranu.

Untuk keperluan dari data penelitian, peneliti akan mencari data yang menyangkut dengan topik penelitian tersebut.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada kesejahteraan dalam lingkup makro

##### 2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi keberlangsungan dan kemajuan dalam program-program pemerintah. Kemudian juga dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan makro terhadap yang diteliti.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Bagi Lembaga

Sebagai sumbangsih dalam kebijakan pengambilan keputusan dalam masalah tentang bantuan tersebut.

##### 2) Akademik

Sebagai sumbangan perbendaharaan untuk perpustakaan IAIN  
Tulungagung

### 3) Penelitian Lanjutan

Sebagai referensi bagi rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan  
bidang yang sama dan variable yang berbeda.

## H. Penegasan Judul

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul proposal ini, maka penulis merasa perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga akan memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud dari judul tersebut.

Judul Proposal ini selengkapnya adalah *“Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mojoranu Sooko Kabupaten Mojokerto ”*.

Dari judul tersebut, penulis akan menjelaskan pengertiannya sebagai berikut :

### Penegasan konseptual

#### a. Analisis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>16</sup>

b. Peran

Adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang atau segala sesuatu dalam posisi tertentu dan dalam segala hal<sup>17</sup>

c. Program keluarga harapan

Adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PHK dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

d. Pengentasan adalah mengangkat keatas, yaitu membawa kearah yang lebih baik

e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di Negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan sustainable. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 10 April 2019, pukul 5:36

<sup>17</sup> Pahrizal Iqrom, "*Reformasi Birokrasi di Nusantara*", (Malang : UB Press, 2013),hal.88

<sup>18</sup> <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 25 januari 2019

pokok minimal suatu Negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan Negara lainnya.<sup>19</sup>

f. Ekonomi islam

Secara umum didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunnah Rasul serta Ijtihad para ulama tentang kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya atau cara pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan, akan tetapi jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah, jadi tingkat kesejahteraan nya juga ikut menurun.

---

<sup>19</sup> Al-arif, M Noer Rianto, "Teori Makro Ekonomi Islam", (Bandung:Alfabeta. 2010) ,hal. 225

<sup>20</sup> Ridho Diana, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)", (Lampung : UIN Raden Intan, 2018),hal. 3

## **I. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama atau inti yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Definisi Istilah, dan sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka yang berisikan pemaparan atas teori yang di gunakan peneliti sebagai acuan dan dasar pemikiran.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Hasil penelitian terdiri dari: Paparan Data, Temuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan berisikan pemaparan dari hasil temuan selama penelitian untuk kemudian di olah menjadi pemecahan permasalahan.

Bab VI Penutup terdiri dari: Kesimpulan, Implikasi Penelitian dan Saran/Rekomendasi.

Bagian akhir terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup